

Demokrasi & Partisipasi Publik¹

Oleh: Dwi Harsono

Pendahuluan

Dewasa ini istilah demokrasi sering muncul di media massa Indonesia menjelang diadakannya pemilihan legilatif maupun kepala daerah (PILKADA). Tidak berbeda dengan pemilihan yang akan terjadi di lingkungan Rukun Tetangga (RT) 02 Rukun Warga (RW) 19 Dukuh Baturan Desa Trihanggo Gamping Sleman. Meskipun dalam skala dan lingkup yang kecil, tapi pesta demokrasi adalah hak dari warga negara untuk menentukan pimpinan di daerahnya yang dianggap layak dan mampu memegang amanat masyarakat.

Secara terminologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari kata *demos* yang artinya adalah rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan². Dalam bahasa Inggris, *democracy* artinya adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat. Sehingga apabila makna dari kedua kata tersebut digabungkan maka demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Sedangkan secara umum demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat artinya adalah pemerintah yang memperoleh amanat merupakan anggota masyarakat yang dipilih dan kemudian diberi amanat oleh rakyat. Oleh rakyat artinya adalah pemerintahan yang dibentuk merupakan hasil dari kesepakatan bersama oleh rakyat sehingga daerahnya memiliki struktur pemerintahan sehingga menjadi teratur. Sedangkan untuk rakyat, memiliki arti bahwa pemerintahan yang dibentuk kemudian bekerja untuk mengabdikan dan melayani rakyat tersebut sehingga masyarakat menjadi sejahtera.

¹Disampaikan pada saat pertemuan warga RT 02 RW 19 Baturan Kidul Trihanggo Gamping Sleman DIY 55291 dalam rangka persiapan Pemilihan Ketua RT 02 periode 2007-2011 tanggal 10 Juli 2007

²Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> pada 5 Juli 2007

Inti Demokrasi

Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan melalui suara yang digunakan dalam pemungutan suara dalam pemilihan umum. Dengan demikian suara rakyat menjadi penentu dalam pengambilan keputusan pada masyarakat tersebut. Pemilu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dianggap paling layak dan mampu untuk mengemban amanat. Kemudian pemimpin yang terpilih akan memperoleh mandat dari rakyat untuk mengelola pemerintah melalui lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan berasal dari anggota masyarakat yang bertugas untuk menjaga agar pelaksanaan pemerintahan tidak mengalami pemyimpangan.

Lembaga perwakilan merupakan wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi sehingga suara rakyat tersalurkan pada pemerintah. Rakyat juga bisa secara langsung memberikan masukan tidak hanya kepada lembaga perwakilan tetapi juga kepada pemerintah. Tindakan ini disebut dengan partisipasi publik (rakyat). Partisipasi adalah suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas sumberdaya³. Sedangkan Partisipasi publik secara sederhana diartikan sebagai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kenegaraan. Wujud partisipasi publik bisa beragam, misalnya ikut pemilihan umum (pemilu), membayar pajak, menyampaikan aspirasi, keluhan, mengontrol pemerintah, dan lain-lain.

Salah satu contoh nyata dari partisipasi publik adalah keikutsertaan dalam pemilihan umum (pemilu). Istilah lain dari pemilu adalah pesta demokrasi. Disebut demikian karena pemilu merupakan kegiatan besar menyerupai perayaan/pesta dimana rakyat berhak dan menjadi penentu dari perjalanan masyarakatnya. Pemilu pertama kali dilaksanakan pada jama Yunani Kuno untuk memilih anggota senat polis yang memberikan masukan kepada kaisar. Pada jaman tersebut pemilu dilaksanakan secara langsung dengan cara memilih calon anggota senat yang ada. Di

³ Sajogyo, “Keswadayaan dan Saling Memberdayakan”, Jurnal Ekonomi Rakyat Th. I - No. 5 - Juli 2002

samping itu, jumlah penduduk yang memiliki suara dalam suatu polis masih sedikit sehingga pemilihan bisa dilakukan secara langsung. Dewasa ini, jumlah rakyat di suatu negara sangatlah besar sehingga pemilihan secara langsung sering kali memakan waktu sehingga dikenal pemilihan tidak langsung. Rakyat memilih anggota lembaga perwakilan dan lembaga perwakilanlah yang memilih kepada negara tersebut. Namun hal ini mendapat banyak kritik karena lembaga perwakilan seringkali tidak mewakili aspirasi dari rakyatnya sehingga pemilihan langsung tetap digunakan untuk memilih pemimpin masyarakat.

Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Desa dilakukan secara langsung. Demikian halnya dengan rencana pemilihan Ketua RT 02 ini. Rakyat memiliki kedaulatan melalui suaranya untuk memilih dan menentukan pemimpin yang paling dipercaya untuk mengemban amanat. Ketika seseorang memilih calon pemimpin, yang bersangkutan sebenarnya sama saja dengan mendelegasikan hak untuk menjadi pemimpin dan mengelola daerahnya karena setiap individu memiliki hak yang sama. Mengingat setiap individu memiliki hak yang sama untuk memimpin. Ketika memilih seorang pemimpin berarti merelakan hak tersebut dilakukan oleh orang lain. Namun demikian hak tersebut tidak diserahkan hanya dipinjamkan dalam bentuk amanat dan rakyat bisa meminta kembali bahkan mencabut amanat/hak dipinjamkan kepada pemimpinnya apabila dianggap gagal atau melakukan penyimpangan. Amanat dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin adalah pemberian rakyat dan bersifat sementara dan bisa dicabut. Pemimpin adalah individu yang diberi amanat untuk menjalankan pemerintahan. Presiden, DPR, Bupati, Walikota, DPRD, dan kepala desa adalah pemimpin. Oleh karena itu seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada rakyatnya dan menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat. Hal ini juga berlaku kepada calon Ketua RT yang akan dipilih.

Kepemimpinan dalam Masyarakat

Pemimpin adalah individu yang bertugas sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan memiliki tugas untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat sehingga

berjalan dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan memungkinkan terjadinya benturan antar anggota masyarakat dan berakibat pada timbulnya perselisihan. Pemimpin dalam hal ini harus mengakomodasi kepentingan rakyat banyak sehingga pemenuhan atas kebutuhan yang menjadi hajat hidup orang banyak harus didahulukan. Masyarakat juga harus mematuhi ketentuan pemerintah yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakatnya sehingga resiko terjadi konflik dapat dikendalikan. Meskipun tidak memimpin sendiri, tapi dibantu oleh perangkat organisasi lain, pemimpin haruslah memiliki visi yang baik sehingga masyarakat yang dipimpinnya memiliki tujuan.

Pemenuhan kebutuhan membutuhkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sumber daya tersebut harus dikelola dan dialokasikan secara tepat sehingga sasaran yang dituju mengena dan tidak terjadi pemborosan. Masyarakat juga harus secara aktif melakukan pengawasan terkait pemanfaatan sumber daya daerahnya karena kekayaan daerah pada hakikatnya adalah milik masyarakat dan dipungut dari masyarakat oleh pemerintah meskipun pengelolaan diserahkan pada pemerintahan setempat.

Masyarakat dalam menjalankan kehidupannya juga berhubungan dan berdampingan dengan masyarakat lain. Komunikasi yang baik harus berjalan sehingga menciptakan kedamaian antar wilayah. Seorang pemimpin harus menjadi wakil masyarakatnya dalam berhubungan dengan masyarakat yang lain. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga mampu mewakili masyarakatnya untuk berkomunikasi dengan pihak lain.

Keseluruhan tugas yang dimiliki oleh pemimpin adalah amanat dari masyarakatnya. Kekuasaan yang dimiliki merupakan tanggung jawab yang berasal dari masyarakat. Masyarakat dengan sukarela telah menyerahkan haknya menjadi pemimpin untuk dipimpin oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mempertanggungjawabkan tugasnya kembali kepada masyarakat. Ini adalah wujud dari akuntabilitas pemimpin kepada warganya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja

dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi dalam penggunaan sumber daya yang ada, dan apa saja yang telah dicapai dengan penggunaan wewenang dan sumberdaya tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban⁴. Dengan demikian masyarakat sebagai pihak yang memiliki sumber daya dan melimpahkannya pada pemimpin akan menilai keberhasilan pelaksanaan tugas yang diamanatkan.

Masyarakat berhak untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani yang dimiliki. Hati nurani yang baik seharusnya bisa mengantarkan pemilihan pada seorang pemimpin yang terbaik di mata masyarakat. Hal ini bertujuan agar tugas-tugas yang dibebankan pada seorang pemimpin bisa berjalan dan berhasil. Oleh karena itu diperlukan kriteria pemimpin yang ideal. Terdapat beberapa kriteria untuk memilih pemimpin ideal, yaitu: 1) Terbuka (jujur): bisa berkomunikasi dengan semua pihak, 2) Transparan (terpercaya): pengelolaan sumber daya bisa diketahui oleh masyarakat, 3) Partisipasif: melibatkan masyarakat dalam musyawarah, dan 4) Akuntabel (bertanggung jawab): menjalankan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Dengan kriteria tersebut, calon pemimpin diharapkan bisa mengemban tugas yang akan diletakkan di pundaknya.

Tugas masyarakat setelah seorang pemimpin berhasil dipilih adalah mematuhi dan menjalankan kebijakan serta peraturan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Setiap warga juga wajib untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan warga sangat penting dan tidak hanya pada pelaksanaannya tapi juga dalam perencanaan kegiatan. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan benar-benar dibutuhkan dan mampu dirasakan manfaatnya secara luas. Selanjutnya, warga juga harus berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan dan kontrol atas

⁴ Julius Hermawan, Memposisikan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Tatanan Good Governance, hermanjul.wordpress.com, diunduh 8 Juli 2007

kegiatan yang diselenggarakan di wilayahnya. Ini adalah wujud dari tanggung jawab moral warga terhadap pemimpin yang dipilihnya.

Penutup

Pemilihan Ketua RT 02 di Padukuhan Baturan merupakan kegiatan dari warga, oleh warga, dan untuk warga. Dengan demikian semua orang yang menjadi warga di lingkungan tersebut memiliki hak yang sama. Hak tersebut adalah untuk memilih dan dipilih menjadi Ketua RT berdasarkan kriteria yang telah disepakati. Oleh karena itu, setiap individu harus siap menjadi ketua apabila dipilih oleh warga yang lain. Yang bersangkutan harus legawa dan siap menjalankan tugas. Sedangkan warga yang lain harus menerima, mematuhi, membantu, dan mengawasi ketua baru demi RT 02 semakin maju di masa datang

Daftar Pustaka

Anonim, Demokrasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/> diunduh 5 Juli 2007

Sajogyo, “Keswadayaan dan Saling Memberdayakan”, Jurnal Ekonomi Rakyat Th. I, No. 5, Juli 2002

Julius Hermawan, “Memposisikan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Tatanan Good Governance”, hermanjul.wordpress.com, diunduh 8 Juli 2007